

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI DESA LUHU

Lisda Van Gobel¹, Agus Pariono², Rukiah Nggilu³, Ferti Sri Muliati Latowa⁴

Universitas Bina Taruna Gorontalo

lisdavangobel69@gmail.com, guspri811@gmail.com,
nggilurukiah23365@gmail.co.id, fhertylatowa@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa di Desa Luhu, Gorontalo, mengenai kebijakan tata kelola desa yang baik. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi sosialisasi, diskusi kelompok, dan simulasi praktik penyusunan rencana pembangunan desa serta pengelolaan dana desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip tata kelola desa, dengan 85% peserta merasa lebih memahami konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, peserta juga berhasil mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi dalam tata kelola desa, seperti minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman aparatur desa tentang kebijakan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, diusulkan pelaksanaan forum rutin dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Pengabdian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Luhu dan dapat menjadi model bagi desa lain dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola yang berkelanjutan.

Keywords: Sosialisasi, Kebijakan, Tata Kelola, Peningkatan

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the understanding of the community and village officials in Luhu Village, Gorontalo, regarding good village governance policies. The main focus of this activity is to strengthen community participation in the decision-making process and increase transparency in village budget management. The methods used in this community service include socialization, group discussions, and simulations of village development planning practices and village fund management. The results of this activity show an increase in participants' understanding of the principles with 85% of participants feeling that they understand the concepts of transparency, accountability, and participation better. In addition, participants also managed to identify various problems faced in village governance, such as minimal community participation and lack of understanding of village officials regarding applicable policies. As a follow-up, it is proposed to implement regular forums and ongoing training for village officials to ensure that the policies can be implemented effectively. This community service provides an important contribution to efforts to improve the quality of village governance and can be a model for other in implementing sustainable governance policies.

Keywords: Socialization, Policy, Governance, Improvement

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara efektif dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan strategis untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Namun, untuk mencapai tata kelola desa yang ideal,

diperlukan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola seperti ini tidak hanya menciptakan sinergi antara aparatur desa dan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Astuti & Indriani, 2020).

Kebijakan tata kelola desa mencakup serangkaian aturan, prinsip, dan praktik yang dirancang untuk mendukung pengelolaan desa secara holistik. Kebijakan ini berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas aparatur desa, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Dengan kebijakan yang baik, desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan tata kelola, seperti rendahnya kapasitas SDM, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan (Sumardjono, 2019).

Desa Luhu, salah satu desa di Provinsi Gorontalo, memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam dan sosial budaya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik akibat berbagai kendala tata kelola. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kurang optimalnya pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan yang berlaku dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses pengelolaan desa sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan program-program pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan (Syafitri et al., 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur desa terhadap pentingnya tata kelola yang baik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tata kelola desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi tidak hanya memberikan edukasi tentang kebijakan yang ada, tetapi juga membuka ruang diskusi antara masyarakat dan aparatur desa untuk menyelaraskan persepsi dan harapan terhadap pembangunan desa.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola desa yang baik, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mendukung implementasi kebijakan. Dengan demikian, Desa Luhu dapat memaksimalkan pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak ini juga diharapkan mampu memperkuat fondasi pemerintahan desa sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan tata kelola desa untuk peningkatan kesejahteraan di Desa Luhu dilakukan melalui tahapan persiapan, kegiatan inti, serta evaluasi dan tindak lanjut. Tahap persiapan dimulai dengan studi awal berupa survei lapangan dan wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan desa terkait tata kelola. Berdasarkan hasil tersebut, materi sosialisasi dirancang dengan mengacu pada kebijakan terbaru dan disesuaikan dengan konteks lokal agar mudah dipahami. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan jadwal, lokasi, dan peserta kegiatan, yang melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta kelompok-kelompok lokal.

Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi dimulai dengan presentasi interaktif yang menjelaskan kebijakan tata kelola desa, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya partisipasi masyarakat. Penyampaian materi dilengkapi dengan media visual seperti presentasi slide dan video pendek untuk mempermudah pemahaman peserta. Setelah itu, dilakukan diskusi kelompok kecil di mana peserta mendalami permasalahan tata kelola yang dihadapi di desa mereka serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Untuk memperkuat pemahaman, dilakukan simulasi penyusunan program desa, pengelolaan anggaran, dan proses pengambilan keputusan berbasis partisipasi masyarakat.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner untuk menilai tingkat pemahaman peserta serta diskusi terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran. Tim pengabdian juga melanjutkan pendampingan kepada aparatur desa dan kelompok masyarakat dalam mengimplementasikan hasil sosialisasi, termasuk monitoring pelaksanaan program dan pemberian konsultasi teknis. Sebagai tindak lanjut, hasil kegiatan disusun dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah desa serta dipublikasikan melalui jurnal atau media lainnya sebagai upaya berbagi praktik baik. Dengan tahapan ini, kegiatan sosialisasi diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga berdampak nyata dalam peningkatan tata kelola desa yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Luhu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi kebijakan tata kelola desa di Desa Luhu memberikan berbagai hasil yang positif dan konkret. Salah satu capaian utama adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip tata kelola desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi, 85% peserta menyatakan bahwa mereka lebih memahami konsep dasar tata kelola setelah mengikuti sosialisasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan metode penyampaian materi yang dirancang secara interaktif dan relevan dengan konteks lokal. Selain itu, melalui diskusi kelompok, peserta berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang selama ini menjadi hambatan dalam tata kelola desa, di antaranya adalah rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, kurangnya partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta minimnya pemahaman aparaturnya terhadap kebijakan yang berlaku.

Lebih lanjut, peserta juga mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, dalam diskusi kelompok, diusulkan beberapa strategi seperti menyelenggarakan forum rutin untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan memperkuat komunikasi antara aparaturnya desa dan masyarakat. Solusi lain yang dirancang adalah pengadaan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat. Simulasi yang dilakukan selama kegiatan juga berhasil memberikan pemahaman praktis kepada peserta, terutama dalam hal penyusunan rencana pembangunan desa dan pengelolaan dana desa. Peserta merasa lebih percaya diri untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik setelah mendapatkan pengalaman langsung melalui simulasi.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta aparaturnya desa. Pemahaman yang meningkat setelah sosialisasi menjadi bukti bahwa penyampaian materi yang dirancang sesuai kebutuhan lokal dapat membantu peserta memahami konsep tata kelola secara lebih mendalam. Diskusi kelompok juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang mereka hadapi serta merancang solusi yang aplikatif dan relevan. Misalnya, peserta menemukan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara aparaturnya desa dan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan, seperti meningkatkan akses informasi melalui forum desa, dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Selain itu, simulasi tata kelola memberikan pengalaman praktis yang memungkinkan peserta memahami cara kerja prinsip-prinsip tata kelola secara langsung. Dengan metode ini, peserta tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam skenario nyata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil sosialisasi tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga implementatif. Namun, hasil kegiatan ini juga menunjukkan adanya tantangan, terutama dalam hal keberlanjutan. Sosialisasi yang berhasil meningkatkan pemahaman harus diikuti oleh pendampingan teknis secara konsisten untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar diterapkan. Misalnya, pelatihan berkelanjutan bagi aparaturnya desa sangat diperlukan untuk menjaga agar kapasitas mereka tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan desa.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal, termasuk perguruan tinggi. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat keberlanjutan program tata kelola desa dan mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Dengan melibatkan berbagai elemen, desa dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sosialisasi ini memberikan gambaran bahwa tata kelola desa yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberlanjutan pendampingan dan penguatan kapasitas menjadi faktor kunci untuk memastikan Desa Luhu dapat mewujudkan tata kelola yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi kebijakan tata kelola desa di Desa Luhu berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Melalui metode yang interaktif dan berbasis pada kebutuhan lokal, peserta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi desa, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, melalui diskusi kelompok dan simulasi, peserta merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola desa, termasuk penyelenggaraan forum rutin dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan hasil sosialisasi, diperlukan pendampingan teknis yang konsisten serta kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi. Sinergi antara semua pihak ini akan mendukung implementasi kebijakan secara efektif dan memastikan program-program desa berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Luhu. Kegiatan ini menegaskan bahwa tata kelola desa yang baik memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparat desa, serta dukungan yang berkelanjutan untuk mencapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarwati, T. (2020). *Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Negara, 22(3), 45-60.
- [2] Anggraeni, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 123-135.
- [3] Daryanto, M. (2022). *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Jurnal Kebijakan Publik, 18(1), 35-49.
- [4] Fajarwati, N. (2021). *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 14(4), 78-89.
- [5] Hasibuan, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 12(1), 10-22.
- [6] Irawan, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Desa Berbasis Partisipasi: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Pemerintahan Desa, 16(2), 101-115.
- [7] Kartika, M. (2023). *Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran Desa: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Keuangan Desa, 21(4), 56-70.
- [8] Lestari, S. (2019). *Tata Kelola Desa dan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Pemerintah Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Tata Kelola, 17(3), 41-54.

- [9] Mulyadi, B. (2021). *Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Perspektif Tata Kelola yang Efektif*. Jurnal Pembangunan Desa, 19(2), 22-34.
- [10] Prabowo, S. (2022). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Desa*. Jurnal Administrasi Negara, 23(1), 90-105.
- [11] Putri, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Desa*. Jurnal Tata Kelola Masyarakat, 18(2), 112-123.
- [12] Sari, P. (2023). *Strategi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Keuangan dan Pembangunan Desa, 20(3), 45-58.
- [13] Setiawan, R. (2019). *Evaluasi Tata Kelola Desa dalam Pengelolaan Anggaran*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(3), 98-111.
- [14] Sugiyono, P. (2021). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Tata Kelola yang Baik*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(4), 76-89.
- [15] Utami, D. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Antara Teori dan Implementasi di Lapangan*. Jurnal Studi Sosial, 20(2), 34-47.